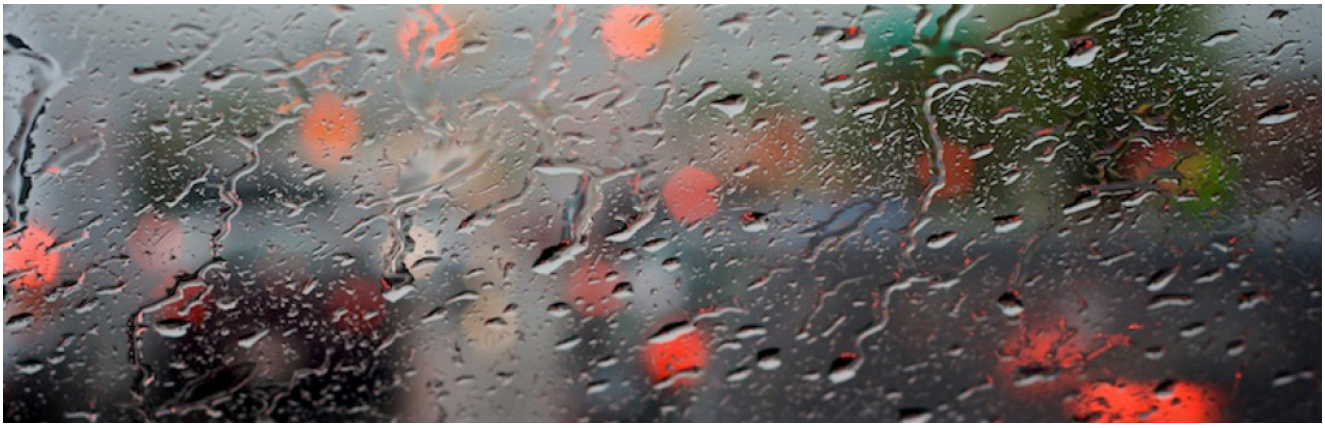

Indonesia Tidak Gelap, Ia Hanya Tak Pernah Terang

March 23, 2025 by kinky ninja | 4 Comments

> *Democracy is the menopause of Western society, the Grand Climacteric of the body social. Fascism is its middle-aged lust.*
>
> —JEAN BAUDRILLARD, "COOL MEMORIES", 1990

DALAM BEBERAPA HARI TERAKHIR, beberapa kota di Indonesia ricuh dengan gelombang demonstrasi—yang beberapanya berakhir dengan bentrokan yang cukup panjang—untuk menolak pengesahan UU TNI yang tak lebih dari sekadar legalitas untuk kembalinya Dwifungsi TNI. Soal ini disanggah melalui perilaku yang oleh Orwell pertengahan abad lalu disebut sebagai *doublespeak*, di mana para birokrat—dan para petinggi militer juga tentunya—bahwa ini bukanlah sebuah indikasi kembalinya Dwifungsi TNI. dalam panggung kekuasaan Indonesia, tetap saja, pengintegrasian militer ke dalam lembaga sipil apa *sih* sebutannya kalau bukan pelebaran peran, yang awalnya hanya pertahanan/keamanan ditambah dengan sosial/politik, alias dua fungsi,

MEMORIES

- Tentang Homofobia
- Pasca Agustus '25
- Singapura, Juni 2026: Tangerine
- Gregorius Hugo
- À l'éloge des femmes plus âgées
- Manusiawi, Teramat Manusiawi
- Anarkis #12: Tentang Alfredo Bonnano
- Paradoks Kesempurnaan Sistem
- Kisah Singkat Soal Pengkhianatan
- Tentang Penderitaan

TIME

March 2025

M	T	W	T	F	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

alias Dwifungsi. Doublespeak. Menyatakan sesuatu sebagai bukan A sementara yang dilakukan jelas-jelas adalah A.

Bagi yang memperhatikan dan mengalami, hal seperti ini sudah lama terjadi dan saat ini *kembali terjadi*. Bayangkan, 2569 orang tentara aktif kini telah menduduki jabatan sipil. Dominasi militer jelas kembali menguat dan mendapatkan legitimasi untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan harian sipil. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, sudah sejak pemerintahan Jokowi, jalan menuju dominasi militer sudah dirintis—hanya kalian-kalian pendukung Jokowi tak pernah mau melihat. Kalian tetap menggembar-gemborkan "kebaikan" Jokowi sebagai sipil, sebagai eranya pemerintahan sipil berjaya. Termasuk kalian yang mengaku Kiri, yang sebelumnya paling doyan melancarkan kampanye pencabutan Dwifungsi TNI (dulu pada masa gencarnya kampanye, militer Indonesia masih disingkat ABRI, bukan TNI). Aku tidak tahu ada masalah apa dalam benak orang-orang Kiri itu. Intelektual yang bisa dianggap Kiri seperti Martin Suryajaya juga mendukung Jokowi, bukan? Cinta itu buta, kata banyak orang. Dan mereka juga tampaknya buta.

Kasus lain dari reaksi para intelektual adalah bermain aman, bersih, namun terlihat tetap berintegritas. Seorang perempuan yang kukenal kritis dan tak asing dengan teori-teori filsafat dan Kiri bahkan juga melangkah lebih jauh saat berkomentar soal Prabowo—ia berkata bahwa seharusnya kita tak lagi melihat masa lalu Prabowo, melainkan cukup dilihat saja apakah dia sebagai presiden mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan baik atau tidak. *Bajingan apologis*. Perempuan yang selalu memamerkan keintelektualitasannya, namun pura-pura tak bisa melihat bagaimana Prabowo tak lebih dari sekadar tentara masa Orba yang delusif dan berpikir bahwa saat ini dunia masih berada dalam era Perang Dingin, dengan menyatakan agar kita tak lagi menilai dari masa lalunya. Kalau masa lalu itu tak penting, kini coba bayangkan kalau kita berada dalam sebuah situasi di mana kita memiliki seorang anak berusia 5-6 tahun, dan sedang mencari sekolah PAUD. Lalu ada sekolah PAUD yang secara fasilitas baik, kurikulumnya baik, harga terjangkau pula, namun kepala sekolahnya adalah mantan napi kasus pedofilia. Apakah engkau akan menyekolahkan anak kalian di sekolah tersebut? Apakah lantas kita bisa berkata, tak usah bahas masa lalunya, cukup perhatikan apakah ia bisa menjabat posisi kepala sekolah dengan baik? Secara legal dan formal, tentu saja ia benar, tapi pertanyaanku adalah, *apakah kalian mau memasukkan anak kalian ke sekolah tersebut?*

« Feb Apr »

RECENT RESPONSES

- kinky ninja on Pasca Agustus '25
- pollastrius on Pasca Agustus '25
- kinky ninja on Gregorius Hugo
- Penyuka yuka honjo on Gregorius Hugo
- kinky ninja on Anarkis #12: Tentang Alfredo Bonnano
- kinky ninja on Manusiawi, Teramat Manusiawi
- Library Assistant on Manusiawi, Teramat Manusiawi
- rex tukangtidur on Anarkis #12: Tentang Alfredo Bonnano
- kinky ninja on Kisah Singkat Soal Pengkhianatan
- kinky ninja on Tentang Penderitaan

FOLLOW MEMORIES VIA EMAIL

Enter your email address to follow this journey back home and receive notifications of new posts by email.

Email Address

Sign me up!

STORAGE

Jokowi mempraktekkan apa yang disebut sebagai kontrol sipil pragmatis. Dalam studi Hubungan Sipil-Militer (HSM), kontrol sipil pragmatis adalah salah satu teori kontemporer. Dikembangkan Donald Travis—salah satu pemerhati HSM di Amerika Serikat, teori ini hadir sebagai kritik akibat teori-teori HMS dasar yang dianggap tidak bisa membaca realitas keamanan nasional di Amerika Serikat.

Secara umum, dalam teori dasar HSM, eksis dua jenis kontrol sipil: subyektif dan obyektif. Kontrol sipil subyektif memberi fokus integrasi militer dalam sistem sosial dan politik di suatu negara. Apabila di masa perang, personil militer diambil dari sipil yang kemudian membentuk milisi. Sementara di masa damai, mereka akan kembali ke masyarakat dan bekerja sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, kontrol sipil objektif menekankan pemisahan yang jelas antara ranah militer dan ranah sosial- politik. Dalam kontrol sipil objektif, militer diharapkan berkembang menjadi organisasi profesional, dengan parameter-parameter seperti: 1) mampu memiliki spesialisasi dan kompetensi yang berkaitan dengan konflik/perang—seperti menggunakan senjata, melumpuhkan lawan, dll.; 2) bisa menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik; 3) personilnya menghindari spesialisasi pada bidang-bidang teknis dan karir yang tidak terkait dengan organisasi militer—seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dll.; serta 4) organisasinya bersedia mematuhi pemimpin politik yang sah dan/atau otoritas tunggal yang diakui—seperti presiden. Namun kontrol sipil objektif akan optimal apabila militer juga bersedia untuk: 1) dipisahkan dari struktur sosial dan politik di dalam masyarakat; 2) ditugaskan di sektor pertahanan; 3) berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional mereka, tanpa terpengaruh nilai-nilai dan ideologi yang berkembang di masyarakat; dan; 4) mengelola organisasinya dengan otonom dan independen.

Sementara, mengikuti Travis, Jokowi menerapkan kontrol sipil pragmatis, Secara praktis, kontrol sipil atas militer harus diterjemahkan fleksibel, tergantung pada karakteristik konflik/perang, dan konteks lingkungan strategis. Fleksibilitas ini didukung realitas bahwa militer berada di tengah lingkungan sosial dan politik yang plural-demokratis. Oleh karena itu militer pun, baik secara institusi dan individu bisa berperan dalam politik. Memangnya yang disebut Dwifungsi TNI itu apa kalau bukan soalan ini?

Namun memang ada benarnya, bahwa sekadar menyudutkan Prabowo dan memberi ruang Jokowi membersihkan diri seperti yang mulai

Select Month

STRONGEST MEMORIES

Selamat Ulang Tahun, Mentor Terbaikku

Anarkis #8: Tentang Sudut Pandang

Dunia Spektakular: 1984, Afghanistan, dan Taliban

Tentang Bergelimang Harta

Tentang Pencatatan Perjalanan

Hong Kong, Maret 2019: Kowloon Walled City, Kota Anarki Terakhir

Dunia Pascamodern: Teknologi Webcam dan Panoptikon

Antara Aku, Dirimu, dan Dirinya: Sekuel

Antara Aku, Dirimu, dan Dirinya: Prekuel

Vero

banyak diungkapkan oleh para pemuja Jokowi untuk membela diri, adalah sebuah kesalahan fatal lain. Prabowo tak lebih dari boneka yang digerakkan oleh Jokowi. Ia terpilih tidak karena rancangan agenda dan visi yang realistis, melainkan karena "goyang gemoy" yang ia pertontonkan berulang-ulang. Sementara Jokowi, ialah yang merintis jalan. Ia adalah arsitek dari kembalinya kekuasaan militer dalam otoritas Indonesia secara legal—yang cocok untuk diimplementasikan menggunakan mantan jenderal yang delusif, doyan berjoget, dan memelihara kucing gemuk bernama Bobby—yang juga aneh karena dalam cukup banyak berita era Orba, ia adalah pecinta anjing, dan baru belakangan kala kampanye ia digambarkan sebagai pecinta kucing, rasanya malah tak ada berita soal ia memelihara anjing sama sekali. Militerisasi ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak awal Jokowi naik daun—yang sebetulnya lucu dan spektakular. Ada yang memperhatikan bagaimana Jokowi melibatkan purnawirawan TNI/Polri dalam kampanyenya? Memang Megawati dalam era pemerintahan Gus Dur juga mulai melibatkan militer dalam kampanyenya, namun ia tak seganas Jokowi dalam melancarkan strateginya dalam mengembalikan Dwifungsi. Betul bahwa tak ada larangan untuk melibatkan purnawirawan dalam kampanye politik, namun itu adalah indikasi awal. Pada Pemilu 2014 saja, tercatat dalam tim pendukung Jokowi-Kalla, ada 9 orang purnawirawan, belum termasuk 23 purnawirawan pendukung di luar tim. Sementara dalam Pemilu 2019, ada 6 purnawirawan dalam tim kampanye, sementara di luar tim ada purnawirawan semakin banyak. Motivasi para pendukungnya tersebut? Dengan mudah bisa ditebak dari latar belakang mereka: *bisnis*. Memangnya siapa Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Moeldoko, untuk menyebut tiga orang saja?

Saat Jokowi menjabat, tentu saja, para purnawirawan dari tim kampanye tersebut mendapat jabatan-jabatan strategis dan lahan basah untuk bisnis, lihat saja: Luhut Panjaitan, Wiranto, Prabowo, Doni Monardo, Agus Suhartono, dan banyak lagi lainnya dengan total 28 orang militer dalam posisi penting. Dan saat pandemi menyerang, sebagaimana banyak negara yang merangkul tragedi tersebut untuk dimanfaatkan demi militerisasi negara, begitu juga di Indonesia. Renungkan dan pertanyakan, kala berada dalam masa pandemi, mana yang lebih berperan dalam mengambil keputusan dalam soalan strategis terkait pandemi, jajaran kedokteran dan ahli medis, ataukah militer? Tak heran respon dan komentar-komentar jajaran pemerintahan sama sekali tak profesional atau memperjelas pemahaman publik soal pandemi—dari promosi jamu hingga bercandaan soal sistem imun orang-orang Indonesia yang luar biasa, yang sama sekali tak lucu karena korban terus berjatuhan. Lalu lihat

juga soal pengembangan *Food Estate*, memangnya dalam pelaksanaan siapa yang bertugas memuluskan pembukaan lahan di lapangan? Lalu ada yang pernah menanyakan kemana perginya kayu-kayu hasil dari pembukaan hutan besar-besaran di area-area hutan terlebat di pulau-pulau di Indonesia demi pengembangan proyek tersebut? Oh, tentu tidak. Kalian tahu harga kayu Merbau ukuran 3 x 10 x 400 cm? Rp26.000.000. Itu yang paling murah. Berapa hektar luasan lahan yang dibuka? Berapa banyak kayu? Kemana kayunya? Oh tentu kalian juga tidak tahu.

Lalu hadir Prabowo setelah Jokowi gagal dengan kampanye Presiden 3 Periodenya, yang sebetulnya tak lain dan tak bukan sekadar kepanjangan tangan Jokowi. Kini UU TNI memperluas lagi peran militer yang sudah dibangun sebelumnya oleh Jokowi. Suharto membutuhkan waktu 32 tahun untuk meraup banyak bidang ke dalam kekuasaannya. Jokowi? Ia hanya butuh 2 periode masa jabatan presiden.

Lalu kalian terkejut?

Lalu kalian juga terkejut saat jurnalis Tempo dikirimi kepala babi? Pernah hadir sebuah masa di mana jurnalis dikirimi kepala manusia, namun kalian semua lupa. Kalian juga terkejut menyadari bahwa ormas-ormas yang membubarkan dan mengkonfrontasi para demonstran di Bandung dan beberapa tempat lainnya adalah ormas yang dikoordinir oleh tentara? Pernah hadir sebuah masa di mana militer mengorganisir para preman di bawah nama Pamswakarsa, yang digunakan untuk menghasilkan konflik horizontal dengan menyerang para demonstran yang dulu mengkampanyekan anti-Suharto. Para ormas dan preman tersebut dapat menggunakan senjata tajam dan melakukan apapun, sementara militer dan polisi dapat dengan mudah mencuci tangan dengan menyebut bahwa kejadian tersebut adalah konflik horizontal yang awalnya dipicu akibat diselenggarakannya demonstrasi kontra pemerintah. Jadi kalau terjadi kekacauan dan bisa jadi jatuh korban, siapa yang akan dipersalahkan? Demonstran kontra pemerintah. Kalian juga lupa itu sepertinya.

Sungguh, kalau kalian bersedia mengingat, seharusnya kalian sekarang tak perlu terkejut, karena militer sudah sejak dulu berbisnis di Indonesia, dan sudah sejak dulu juga berusaha untuk tidak digeser dari perannya dalam bidang sosial/politik. Dan memangnya sejak kapan Dwifungsi itu dicetuskan? 1958 di Magelang oleh A.H. Nasution. Tahu bukan siapa dia? Iya, ia satu-satunya yang selamat dari penculikan oleh Cakrabirawa pada 1965. Kalian juga yang selama ini masih melihat ia

sebagai sosok pahlawan, bukan? Sang ayah yang kehilangan anak semata wayangnya, Ade Irma Suryani, di tangan pasukan Cakrabirawa, dan kalian merasa berempati, lalu mengesampingkan putusan-putusan berbahaya dari sang ayah tersebut. Sekarang kesampingkan empati, kalian yang tak setuju dengan Dwifungsi TNI, kini kalian tahu siapa pencetusnya.

KSAD, Maruli Simanjuntak, belum lama ini berkomentar bahwa mereka yang mengkritik diloloskannya UU TNI sebagai kampungan. Mungkin ia ada benarnya, karena sesungguhnya Indonesia belum pernah lepas dari kendali militer dalam kehidupan sosial/politik—selain ilusi sejenak bahwa kita pernah lepas. Jadi kalau belum pernah lepas, bagaimana bisa sekarang disebut sebagai kembalinya Dwifungsi? Namun mungkin ucapan seorang komandan militer TNI di Papua justru benar, bahwa kini TNI bukan lagi Dwifungsi, melainkan Multifungsi. *Cakep.* Hal ini dibenarkan juga dengan pernyataan Dedi Mulyadi, sang gubernur Jawa Barat, yang menyatakan bahwa pemerintah Jawa Barat *telah* bekerjasama dengan TNI AD untuk sembilan ruang lingkup kerjasama: dari pembangunan jalan, pengelolaan sampah, perbaikan rumah, hingga status keadaan darurat bencana. Artinya TNI memang sudah difungsikan untuk multifungsi, dan itu juga *sudah dilakukan*, bukan lagi sekadar rencana atau menunggu UU TNI disahkan. Artinya, persis seperti ujaran Karlina Supeli, soal UU TNI ini, semua sudah dijalankan terlebih dahulu, legalitas menyusul kemudian. Jadi kehebohan UU TNI ini hanyalah proses legalitasnya saja, pelaksanaan *sih* sudah sejak kemarin-kemarin hanya tak ada yang tahu atau sadar. Pola ini persis seperti yang selalu dilakukan oleh Jokowi, sebagai negarawan yang dianggap banyak orang sebagai bukti dominasi sipil dalam pemerintahan, justru merombak aturan-aturan yang tak sejalan dengan kehendaknya, agar semua yang ia inginkan menjadi legal. Dan itu semua yang dilakukan oleh para pahlawan sipil kalian. Lihat saja, kalian yang dulu mendorong semua orang agar memilih Jokowi. Supremasi sipil kata kalian. *Kalian yang memilih dia, bukan?* Lalu juga bukankah Dedi Mulyadi, yang agar terasa dekat menyebut dirinya Kang Dedi, adalah pengejawantahan pemerintah bersih dan taat aturan, yang selama ini banyak dari kalian elu-elukan karena dianggap berpihak pada rakyat? Lihat sekarang di mana ia berdiri, lihat apa yang diam-diam sudah ia lakukan. Multifungsi TNI. *Cakep.* Semua urusan pada akhirnya nanti akan menjadi urusan tentara. Silakan bayangkan apa yang bisa dan akan mungkin terjadi. Dan kita semua tahu bahwa apapun yang berpotensi terjadi, pasti akan terjadi. *Murphy's Law.* Kalian semua terbuai hanya dengan bagaimana pemerintah memberikan panggilan informal pada diri mereka sendiri, Pakde untuk menyebut

Jokowi, Kang Emil, Kang Dedi, siapa lagi sebutkan? Pakde yang *blusukan*, Kang Emil yang membalasi pesan Whatsapp personal, Kang Dedi yang sering turun ke lapangan dan berbicara dengan publik. Dan kalian terbuai dengan itu semua. Lupa bahwa di balik gaung sipil-sipil-sipil, bergerak militer mengambil alih semua ruang lingkup kehidupan kalian semua.

Namun jangan salah paham, kembali pada konteks bahasan soal UU TNI ini, aku mendukung upaya-upaya untuk demiliterisasi kehidupan sipil—termasuk mendukung aksi-aksi demonstrasi dari yang damai hingga yang merusak—hanya saja aku sadar bahwa aku berbeda dalam pandangan mendasarnya; sebagian besar dari kalian tetap mengharapkan terbentuknya pemerintahan sipil yang bersih, sebuah pengejawantahan dari supremasi sipil, sementara aku? Aku tak percaya dengan demokrasi yang kalian usung, aku tak percaya dengan pemerintahan apapun juga, termasuk yang menyatakan diri pemerintahan sipil dan demokratis seperti yang kalian gembar-gemborkan dan hanya melahirkan Jokowi di sini, Obama di Amerika Serikat, Macron di Prancis, atau Trudeau di Kanada, aku juga tidak tertarik kalau pilihannya seperti kelompok idola Dina Sulaeman, seperti Khamenei di Iran, Xijinping di Tiongkok, Modi di India, Putin di Russia, Erdogan di Turki, serta tentu saja bagiku amit-amit kalau pemerintahannya seperti Assad atau pun Julani di Suriah. Namun aku juga sama sekali bukan pendukung terbentuknya 'negara proletariat' di bawah komunisme gaya Lenin, Mao, Castro, Chavez, atau pun Ho, atau malah juga Pol Pot.

Aku hanya akan bersorak gempita saat masyarakat tekno-industrial ini runtuh. Sementara multifungsi TNI—jujur saja, ini yang sebetulnya kalian mau, bukan?

Epilog:
Kala isu UU TNI ini pertama meletup—kala itu masih RUU TNI—aku mengontak kawan lamaku, seorang mantan anggota PRD, yang kini menjadi penggiat partai Prima. di mana ketua umum mereka, Agus Jabo, kini menjadi wakil Menteri Sosial dalam Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo. Orang yang sama yang sebelum Pemilu kemarin mengontakku dan membujukku agar memilih partai Prima. Melalui Whatsapp, aku mengetik, "Perasaan dulu PRD rajin gembar-gembor Cabut Dwifungsi ABRI. Apa kabar nih yang ketumnya jadi wakil Menteri Sosial dengan isu RUU TNI?" Contreng dua. Namun aku baru menerima

balasan beberapa jam kemudian, “Maaf, Bung, kami tidak dalam posisi strategis untuk berpendapat.” Aku segera merespon, “Iya ya, maaf, aku suka lupa kalau dulu yang bilang Cabut Dwifungsi ABRI itu orang-orang PRD yang belum punya kursi.” namun pesanku tersebut hanya mendapat contreng satu. Bahkan hingga detik ini masih centang satu dan ia tak lagi terlihat foto profilnya. Agus Jabo, pada 2015, saat ia masih menjabat sebagai ketua umum PRD, dalam Kongres VIII PRD berkata tegas: “Kami muncul saat publik kecewa dengan pemerintah.” Sesuatu yang diulang-ulang oleh satu orang kawanku ini saat ia belum lama berselang mempromosikan Prima, bahwa semangat mereka tetap sama walau berganti baju, seakan mereka ini penyelamat bangsa. *Here I come to save the day…* Superman betul lagaknya. Namun iya, itu dulu. Sekarang? Iya, kita semua tahu: *tipikal orang Kiri*.

Categories: Here and Now | Permalink.

Author: kinky ninja

I am only human. Lived in Jakarta but somehow left parts of my heart somewhere else. This blog is about getting on with things as they are. The disasters are all about continuity, about finding ways of enduring in the face of hopelessness; what we do deals in the need to find ways of telling truth in a postmodern world of rumbling emotional chaos. My writings are about both; about bearing the unbearable and giving a true account of it. This is my memories, this is my journey to fade into nothingness.

4 THOUGHTS ON “INDONESIA TIDAK GELAP, IA HANYA TAK PERNAH TERANG”

Leave a comment

Ben Suherman
March 24, 2025 at 11:45 pm

Some people reckon this is a betrayal by those so-called pro-democracy activists who used to bang on about leftist bollocks and kept chanting, ‘Cabut Dwifungsi ABRI.’ But nah, that ain’t it. They never betrayed anyone—this is just their true, rotten mugs showing from day one. Leftist wankers have been bloody rotten from the start, the lot of ‘em!

★ Like

Reply

kinky ninja
March 25, 2025 at 4:24 am

After reading quite enough books on Indonesian and international history, and experiencing it myself, I can only say that I completely agree with your comment.

★ Like

Reply

Ben Suherman
March 25, 2025 at 3:55 pm

So yeah, don’t even waste your breath wondering why those thick-as-shit muppets backed Jokowi back then. Oh and Martin Suryajaya? From day one, that twat’s been nothing but a proper bellend—prancing around in Marx’s words and a handful of other philosophers like some pretentious tosser. But all of it? Just for the most piss-poor reason—licking arse for clout among those absolute wanker leftists in Indonesia. And the funniest bit? Take a fuckin’ look at Indoprogress—nothing but a shit-stirring cesspit of that same old bollocks!!

★ Like

Reply

kinky ninja
March 26, 2025 at 8:21 am

Oh, I didn’t mean to assume or wondering. I just couldn’t pass up the rare opportunity to tease them. My bad, I know.

★ Like

Reply

Leave a comment

← Previous Post Next Post →

Top